

ANALISIS SPASIAL KAWASAN RAWAN NARKOBA BERDASARKAN KARAKTERISTIK ORANG DAN TEMPAT DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Spatial Analysis of Drug-Prone Areas Based on People and Place Characteristic in Makassar City in 2022

Aulia Rachmaudina^{1*}, Andi Zulkifli², Ryza Jazid Baharuddin³

¹Departemen Epidemiologi, FKM Universitas Hasanuddin, arachmaudina@gmail.com

²Departemen Epidemiologi, FKM Universitas Hasanuddin, zulkifliabdullah@yahoo.com

³Departemen Epidemiologi, FKM Universitas Hasanuddin, ryzajazid@gmail.com

Alamat Korespondensi: Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan

Kata Kunci:

Narkoba;
analisis spasial;
angka perceraian

Keywords:

Drugs;
spatial analysis;
divorce rate

ABSTRAK

Latar Belakang: Sulawesi Selatan menempati urutan ke 11 provinsi dengan jumlah pengguna narkoba kelompok pernah pakai terbanyak pada tahun 2020. Tahun 2022, sebanyak 56 kelurahan yang termasuk pada status waspada kawasan rawan narkoba dan sebanyak 97 kelurahan lainnya berstatus siaga.

Tujuan: Mengetahui sebaran kawasan rawan narkoba berdasarkan indikator tingkat pendidikan, tingkat perceraian, kepadatan penduduk, jarak ke terminal, kawasan pesisir, dan permukiman kumuh di Kota Makassar Tahun 2022. **Metode:** Penelitian epidemiologi deskriptif dengan *ecological study*. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 153 kelurahan dan 15 kecamatan di Kota Makassar. Analisis data yang digunakan adalah analisis spasial dan statistik bivariat menggunakan uji korelasi *Spearman*. **Hasil:** Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan yang rendah (sig 2-tailed: 0.202), tingginya angka perceraian (sig 2-tailed: 0.006), tingginya kepadatan penduduk (sig 2-tailed: 0.000), dan keberadaan kawasan kumuh (sig 2-tailed: 0.405) dengan tingkat kerawanan narkoba di suatu kawasan. Korelasi yang signifikan ditemukan pada variabel angka perceraian dan tingkat kepadatan penduduk. Setiap titik terminal mencakup setidaknya dua kawasan berstatus waspada narkoba. Sebanyak 48 dari 56 Kelurahan berstatus waspada narkoba termasuk dalam jangkauan 3000 meter dari garis pantai.

Kesimpulan: Kawasan rawan narkoba tersebar pada 153 kelurahan dengan berbagai kriteria, ada yang memiliki persentase pendidikan rendah yang tinggi, angka perceraian yang tinggi, angka kepadatan penduduk yang tinggi, dekat dari titik terminal, memiliki akses ke kawasan pesisir, dan memiliki kawasan kumuh. Sebanyak 6 kelurahan berstatus siaga berisiko rawan narkoba berdasarkan seluruh indikator yang diteliti. BNNP Sulawesi Selatan sebaiknya melaksanakan upaya P4GN di kelurahan berstatus siaga yang berisiko berdasarkan karakteristik orang dan tempat.

ABSTRACT

Background: South Sulawesi ranked 11th among provinces with the highest number of former drug users in 2020. In 2022, a total of 56 urban villages were classified as “alert” drug-prone areas, while 97 others were classified as “vigilant.”

Objective: To identify the distribution of drug-prone areas based on indicators of education level, divorce rate, population density, distance to terminals, coastal areas, and slum settlements in Makassar City in 2022. **Methods:** This was a descriptive epidemiological study using an ecological study design. The units of analysis were 153 urban villages and 15 sub-districts in Makassar City. Data analysis consisted of spatial analysis and bivariate statistical analysis using the Spearman correlation test. **Results:** There was a positive correlation between low education level (sig. 2-tailed: 0.202), high divorce rate (sig. 2-tailed: 0.006), high population density (sig. 2-tailed: 0.000), and the presence of slum areas (sig. 2-tailed: 0.405) with the level of drug vulnerability in a given area. Significant correlations were found in divorce rate and population density variables. Each terminal point covered at least two drug-prone “alert” areas. A total of 48 out of 56 drug-prone urban villages were located within a 3,000-meter range from the coastline. **Conclusion:** Drug-prone areas were distributed across 153 urban villages with varying characteristics, including high prevalence of low education, high divorce rates, high population density, proximity to terminal points, access to coastal areas, and the presence of slum settlements. Six urban villages classified as “vigilant” were found to be at risk of becoming drug-prone areas based on all investigated indicators. It is recommended that the South Sulawesi National Narcotics Board (BNNP) implement P4GN (Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Circulation of Narcotics) efforts in “vigilant” urban villages identified as at risk based on both individual and environmental characteristics.

©2025 by author.

Published by Faculty of Public Health, Hasanuddin University.

This is an open access article under CC-BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Selama sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan sekitar 26% pengguna narkoba berusia 15-64 tahun, yang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, dari 226 juta jiwa yang setara dengan 5% dari jumlah penduduk dunia pada tahun 2010 menjadi 284 juta jiwa yang setara dengan 5,6% dari jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 di seluruh dunia. Tren penggunaan narkoba mengalami perbedaan di berbagai negara dan wilayah karena kompleksnya interaksi antara dinamika pasar narkoba dan faktor lain seperti norma dan konteks sosial. Misalnya, peningkatan penggunaan kokain di Amerika Latin terjadi karena tingginya ketersediaan pada harga yang terjangkau; dan peningkatan penggunaan metafetamin di Meksiko yang dipicu oleh peningkatan produksi.¹

Prevalensi penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan di Indonesia telah meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Risiko penyalahgunaan narkoba berbeda-beda di tiap kalangan dan komunitas. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh BNN menunjukkan adanya peningkatan risiko keterpaparan narkoba pada perempuan dari 0,20% (2019) menjadi 1,21% (2021), di mana peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan. Survei tersebut juga menunjukkan rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan adalah antara 30-40 tahun (Fathurrohman dkk., 2022).²

Sulawesi Selatan juga tidak terbebas dari kasus penyalahgunaan narkoba. Sulawesi Selatan menempati urutan ke 11 provinsi dengan jumlah pengguna kelompok pernah pakai terbanyak, yaitu sebanyak 77.469 jiwa.³ BNNP Sulawesi Selatan telah mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan narkoba. Barang bukti kasus-kasus yang terungkap sepanjang tahun 2020 terdiri dari 1.973 gram shabu, 282 gram ganja, 4.623,5 butir pil ekstasi, dan 524 gram sintentis. Selain pengungkapan tersebut, New Psychoactive Substances (NPS) juga telah ditemukan beredar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengandung 4-Fluoro-MDMB-Butinaca yang merupakan golongan Syntethic Cannabinoid (Humas BNN, 2020).⁴

Kota Makassar merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota provinsi merupakan tempat yang paling banyak dihuni oleh masyarakat dan memiliki potensi penyalahgunaan narkoba paling besar.⁵ Laporan kategori kerawanan narkoba pada wilayah desa/kelurahan di Kota Makassar tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 56 kelurahan di Kota Makassar yang termasuk pada status waspada kawasan rawan narkoba, sementara sebanyak 97 kelurahan lainnya berstatus siaga (data tidak dipublikasikan, BNNP Sulawesi Selatan, 2022).

Ada berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi tingkat kerawanan narkoba suatu kawasan. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor sosial, ekonomi, dan geografis. Penelitian sebelumnya telah mempelajari beberapa parameter yang menyebabkan suatu kawasan menjadi rawan narkoba. Parameter tersebut yaitu tingkat pendidikan, tingkat perceraian, jenis pekerjaan, kepadatan penduduk, jarak ke terminal, tingkat kemiskinan, tingkat kriminalitas, dan daerah kumuh.⁶ Penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap status penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia adalah jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, status merokok, dan status mengonsumsi alkohol.⁷

Pemetaan kawasan dengan potensi rawan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan menggunakan sistem informasi geografis. Sistem Informasi Geografis dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan dengan memberikan informasi tentang di mana masalah terjadi dan siapa yang terkena dampaknya (Bolstad, 2016).⁸ Dengan demikian, SIG dapat digunakan untuk memetakan kawasan dengan potensi rawan penyalahgunaan Narkoba dengan cara memetakan beberapa indikator kawasan rawan narkoba kemudian dilakukan *overlay* untuk melihat wilayah mana yang memiliki risiko rendah, sedang, dan tinggi akan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui sebaran kawasan rawan narkoba berdasarkan

indikator tingkat pendidikan, tingkat perceraian, kepadatan penduduk, jarak ke terminal, kawasan pesisir, dan permukiman kumuh di Kota Makassar Tahun 2022.

METODE

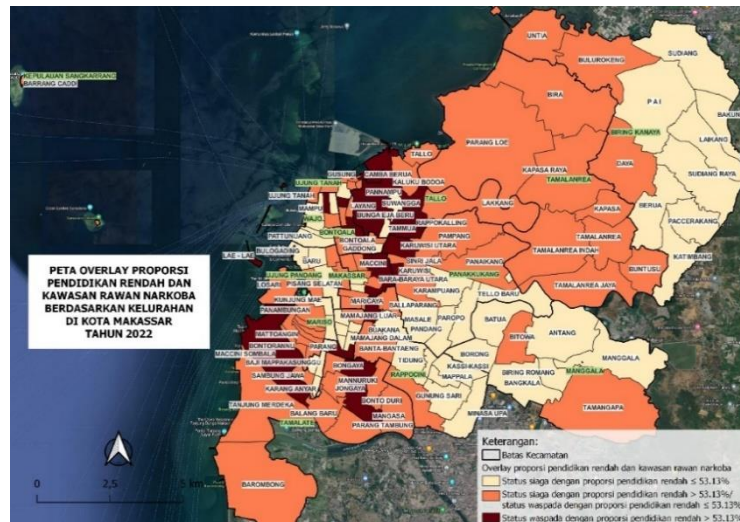
Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi deskriptif dengan ecological study. Dalam penelitian ini dilakukan analisis spasial terhadap peta kawasan rawan narkoba di Kota Makassar tahun 2022. Peneliti menganalisis gambaran fenomena-fenomena sosial-ekonomi dan geografis yang terjadi di Kota Makassar berdasarkan variabel independen, kemudian dipetakan dan dibandingkan dengan analisis pada kawasan rawan narkoba di Kota Makassar. Dari hasil analisis tersebut dapat menggambarkan perbandingan fenomena-fenomena sosial-ekonomi dan geografis antara daerah yang termasuk kawasan rawan narkoba dan bukan, serta dapat menunjukkan rekomendasi daerah yang berpotensi rawan narkoba apabila ditemukan memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan geografis yang menyerupai kawasan rawan narkoba. Variabel independent dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat perceraian, kepadatan penduduk, jarak ke terminal, kawasan pesisir, dan permukiman kumuh. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kerawanan narkoba suatu kawasan.

HASIL

Status kerawanan narkoba berdasarkan tingkat bahayanya dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu aman, siaga, waspada, dan bahaya. Kelurahan di Kota Makassar terbagi ke dalam kategori siaga dan waspada, di mana sebanyak 97 kelurahan berstatus siaga dan 65 kelurahan berstatus waspada. Status kerawanan yang lebih tinggi, status waspada, terdapat pada beberapa kelurahan yang saling berdekatan, yaitu pada kawasan Barat dan Barat Laut Kota Makassar serta kawasan Tamalanrea, Kapasa, dan Buntusu yang terletak di dekat kawasan penyangga, yaitu Kabupaten Maros. Berikut merupakan distribusi kawasan rawan narkoba berdasarkan tingkat pendidikan, angka perceraian, kepadatan penduduk, jarak ke terminal, kawasan pesisir, dan permukiman kumuh di Kota Makassar pada tahun 2022.

Tingkat Pendidikan

Penelitian ini mengkategorikan tingkat pendidikan masyarakat dibedakan menjadi rendah (di bawah SLTA) dan tinggi (SLTA atau lebih). Tingkat pendidikan wilayah kelurahan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu memiliki proporsi masyarakat berpendidikan rendah yang kurang dari atau sama dengan 53.13%, dan memiliki proporsi pendidikan rendah di atas 53.13%. Berikut merupakan distribusi kawasan rawan narkoba berdasarkan tingkat pendidikan per kelurahan di Kota Makassar tahun 2022:



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 1

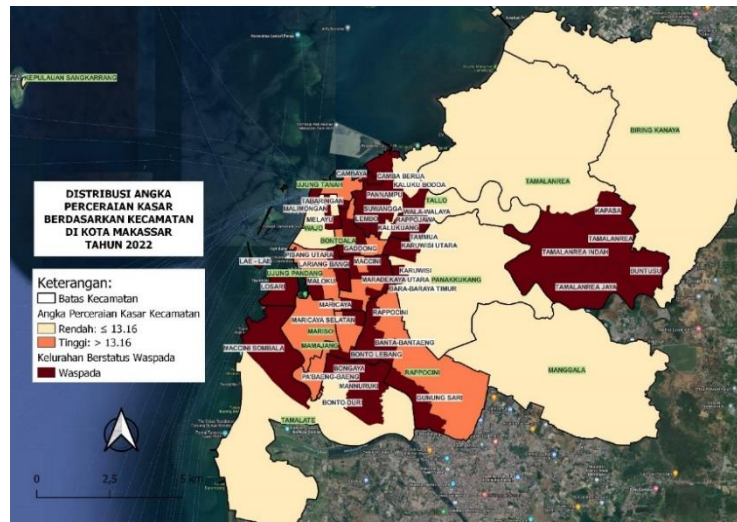
Peta Overlay Sebaran Kawasan Rawan Narkoba dan Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Makassar tahun 2022

Gambar 1 menunjukkan peta tumpang tindih dari peta tingkat kerawanan narkoba dan peta distribusi persentase pendidikan rendah per kelurahan di Kota Makassar tahun 2022. Warna kuning menunjukkan kelurahan dengan status kerawanan siaga dengan persentase pendidikan rendah di bawah 53,13%. Warna oranye menunjukkan kelurahan berstatus siaga dengan persentase pendidikan rendah di atas 53,13%, atau kelurahan berstatus waspada dengan persentase pendidikan rendah di bawah 53,13%. Warna merah menunjukkan kelurahan berstatus waspada dengan persentase pendidikan rendah di atas 53,13%.

Peta tersebut menunjukkan sebanyak 53 kelurahan yang memiliki tingkat pendidikan berisiko rendah (proporsi pendidikan rendah yang rendah) juga memiliki status kerawanan yang berisiko lebih rendah (status siaga). Ditemukan juga sebanyak 33 kelurahan yang memiliki tingkat pendidikan berisiko tinggi (proporsi pendidikan rendah yang tinggi) juga memiliki status kerawanan yang berisiko lebih tinggi (status waspada). Artinya, terdapat kesesuaian tingkat kerawanan narkoba dengan tingkat pendidikan penduduk pada 86 dari 153 kelurahan (56,21%). Hasil uji korelasi antara tingkat pendidikan dan status kerawanan narkoba berdasarkan kelurahan menunjukkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,202. Nilai ini lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status kerawanan narkoba di suatu wilayah kelurahan.

Angka Perceraian

Penelitian ini mengkategorikan angka perceraian yang digunakan adalah angka perceraian kasar per kecamatan, yaitu jumlah kasus perceraian dari semua faktor penyebab yang tercatat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dibagi jumlah penduduk pada kecamatan tersebut di tahun yang sama. Berikut merupakan distribusi kawasan rawan narkoba berdasarkan angka perceraian per kecamatan di Kota Makassar tahun 2022:



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 2

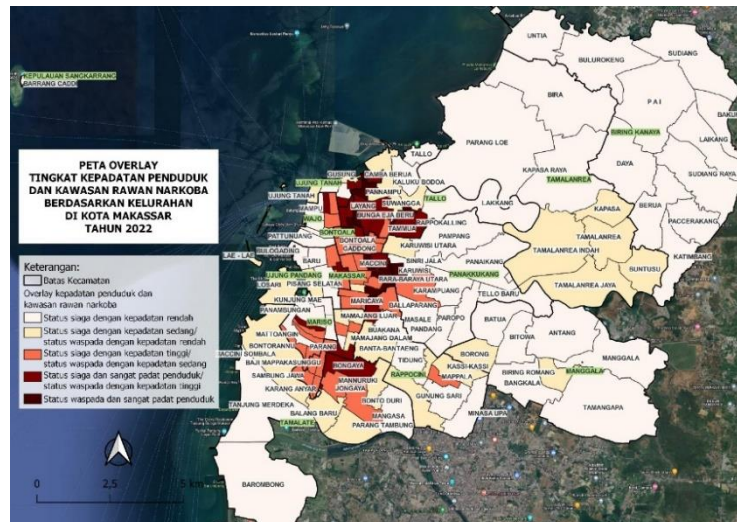
Peta Overlay Sebaran Kawasan Rawan Narkoba dan Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Makassar tahun 2022

Gambar 2 menunjukkan sebaran angka perceraian per kecamatan di Kota Makassar pada tahun 2022. Warna kuning menunjukkan kecamatan dengan angka perceraian kasar rendah, yaitu kurang dari dan sama dengan 13.16. Warna oranye menunjukkan kecamatan dengan angka perceraian tinggi, yaitu lebih dari 13.16. Warna merah menunjukkan lokasi kelurahan berstatus waspada narkoba, baik pada kecamatan dengan angka perceraian tinggi maupun rendah. Tepatnya terdapat 7 Kecamatan yang digambarkan berwarna kuning dan 8 kecamatan yang digambarkan berwarna oranye. Kecamatan yang digambarkan berwarna kuning yaitu: Kecamatan Biring Kanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Adapun Kecamatan yang digambarkan berwarna Oranye yaitu: Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Rappocini.

Peta tersebut menunjukkan sebanyak 51 kelurahan dengan status kerawanan yang berisiko lebih rendah (status siaga) terletak di kecamatan dengan angka perceraian yang rendah. Ditemukan juga sebanyak 32 kelurahan dengan status kerawanan yang lebih berisiko (status waspada) terletak di kecamatan dengan angka perceraian yang tinggi. Artinya, terdapat kesesuaian tingkat kerawanan narkoba dengan angka perceraian kasar pada 83 dari 153 kelurahan (56.21%). Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang searah antara angka perceraian kasar dan tingkat kerawanan narkoba di suatu kelurahan (sig 2-tailed $0.006 < 0.05$).

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas (BPS, 2023). Dalam penelitian ini, kepadatan penduduk yang digunakan adalah kepadatan penduduk per kelurahan di Kota Makassar pada tahun 2022. Berikut merupakan distribusi kawasan rawan narkoba berdasarkan kepadatan penduduk per kelurahan di Kota Makassar tahun 2022:



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 3

Peta Overlay Sebaran Kawasan Rawan Narkoba dan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar tahun 2022

Gambar 3 menunjukkan peta hasil tumpang tindih sebaran kawasan rawan narkoba dan sebaran angka kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2022. Warna putih menggambarkan kelurahan berstatus siaga dengan kepadatan penduduk rendah. Warna kuning menggambarkan kelurahan berstatus siaga dengan kepadatan penduduk sedang atau kelurahan berstatus waspada dengan kepadatan penduduk rendah. Warna oranye menggambarkan kelurahan berstatus siaga dengan kepadatan penduduk tinggi atau kelurahan berstatus waspada dengan kepadatan penduduk sedang. Warna merah terang menggambarkan kelurahan berstatus siaga dengan kepadatan penduduk sangat tinggi atau kelurahan berstatus waspada dengan kepadatan penduduk tinggi. Warna merah gelap menggambarkan kelurahan berstatus waspada dengan kepadatan penduduk sangat tinggi.

Berdasarkan peta tersebut ditemukan bahwa sebanyak 66 kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk berisiko rendah (kepadatan penduduk rendah dan sedang) juga memiliki status kerawanan yang berisiko lebih rendah (status siaga). Ditemukan juga sebanyak 31 kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk berisiko tinggi (kepadatan penduduk tinggi dan sangat padat) juga memiliki status kerawanan yang berisiko lebih tinggi (status waspada). Artinya, terdapat kesesuaian tingkat kerawanan narkoba dengan tingkat pendidikan penduduk pada 97 dari 153 kelurahan (63.40%)

Jarak ke Terminal

Jarak terminal adalah jarak tempuh dari kelurahan ke titik terminal terdekat, yang dihitung dari titik sentroid kelurahan menggunakan alat measure line pada Quantum GIS. Terminal yang diukur antara lain Terminal Regional Daya Makassar, Terminal Malengkeri, Terminal Petikemas Makassar, Terminal Tamalate, dan Terminal Penumpang Anging Mammiri. Setiap titik lokasi terminal menjangkau setidaknya dua kawasan waspada. Misalnya, terminal di Kelurahan Daya menjangkau Kelurahan Kapasa dan Tamalanrea yang merupakan kawasan waspada narkoba. Terminal di kelurahan Borong menjangkau sebagian kelurahan Gunung Sari dan Banta-bantaeng yang juga merupakan kawasan

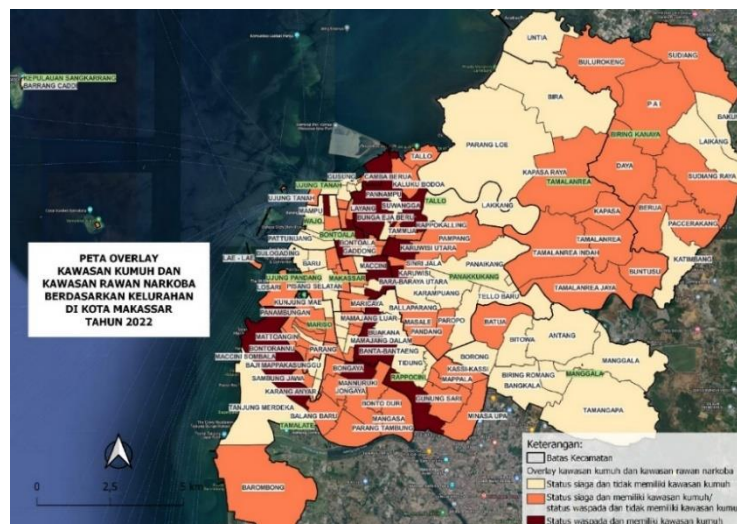
waspada narkoba. Sebagian besar kelurahan yang termasuk jangkauan terminal di Kelurahan Melayu Baru Merupakan kawasan waspada narkoba. Masing-masing titik terminal menjangkau setidaknya dua kelurahan berstatus waspada narkoba.

Akses ke Pesisir

Zona jangkauan garis pantai di Kota Makassar membentang di sepanjang bagian Barat dan Barat Laut Kota Makassar dan melalui beberapa kelurahan. Sebagian besar kawasan rawan narkoba termasuk pada zona jangkauan garis pantai, baik pada jangkauan 1000 m, 2000 m, maupun 3000 m. Hanya sedikit kelurahan waspada narkoba yang tidak terjangkau garis pantai atau berjarak lebih dari 3000 m dari garis pantai, yaitu sebagian wilayah kelurahan Pa'baeng-baeng, sebagian wilayah Kelurahan Banta-bantaeng, Kelurahan Bonto Duri, Manuruki, Gunung Sari, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Kapasa, dan Buntusu. Sebanyak 48 dari 56 (85,71%) Kelurahan berstatus waspada narkoba yang termasuk dalam jangkauan 3000 meter dari garis pantai.

Kawasan Kumuh Distribusi

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dalam penelitian ini, data kawasan kumuh yang digunakan adalah jumlah lokasi kumuh per kelurahan berdasarkan data hasil survei potensi desa Kota Makassar tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 4

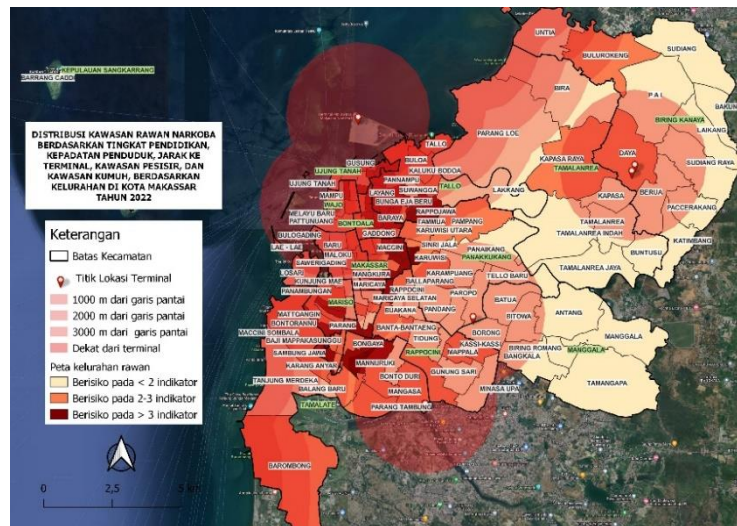
Peta Overlay Sebaran Kawasan Rawan Narkoba dan Kawasan Kumuh di Kota Makassar tahun 2022

Gambar 4 menunjukkan hasil tumpang tindih peta kawasan kumuh dan peta kawasan rawan narkoba di Kota Makassar tahun 2022. Warna kuning menunjukkan kelurahan berstatus siaga narkoba yang tidak memiliki kawasan kumuh. Warna oranye menunjukkan kelurahan berstatus siaga narkoba yang memiliki kawasan kumuh, atau kelurahan berstatus waspada yang tidak memiliki kawasan kumuh. Warna merah menunjukkan kelurahan berstatus waspada yang memiliki kawasan kumuh. Pada peta

tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 58 kelurahan yang tidak memiliki kawasan kumuh memiliki status kerawanan yang berisiko lebih rendah (status siaga). Ditemukan juga sebanyak 28 kelurahan yang memiliki kawasan kumuh juga memiliki status kerawanan yang berisiko lebih tinggi (status waspada). Artinya, terdapat kesesuaian tingkat kerawanan narkoba dengan tingkat pendidikan penduduk pada 86 dari 153 kelurahan (56.21%). Hasil uji korelasi menunjukkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,405. Nilai ini lebih rendah dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa hubungan yang tidak signifikan antara kawasan kumuh dan status kerawanan narkoba.

Kawasan Rawan Narkoba berdasarkan Indikator Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Jarak ke Terminal, Kawasan Pesisir, dan Kawasan Kumuh

Distribusi kawasan rawan narkoba berdasarkan gabungan indikator tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, jarak ke terminal, kawasan pesisir, dan kawasan kumuh disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 5

Peta Overlay Sebaran Kawasan Rawan Narkoba, Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Jarak ke Terminal, Kawasan Pesisir, dan Kawasan Kumuh di Kota Makassar tahun 2022

Gambar 5 menunjukkan hasil tumpang tindih peta kawasan rawan narkoba BNN Provinsi Sulawesi Selatan, dengan distribusi tingkat pendidikan rendah, tingkat kepadatan penduduk, jarak ke terminal, kawasan pesisir, dan kawasan kumuh di Kota Makassar tahun 2022. Setiap kelurahan dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu kuning, oranye, dan merah, berdasarkan peta kawasan rawan narkoba oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan, distribusi tingkat pendidikan, angka kepadatan penduduk, dan kawasan kumuh. Terdapat juga peta sebaran titik terminal dan kawasan pesisir yang di-*buffer* untuk melihat keterjangkauannya. Warna kuning menunjukkan kelurahan yang berisiko pada kurang dari dua indikator. Warna oranye menunjukkan kelurahan yang berisiko pada 2 sampai 3 indikator. Warna merah menunjukkan kelurahan yang berisiko pada keempat indikator.

PEMBAHASAN

Tingkat pendidikan merupakan salah satu determinan kerentanan sosial-ekonomi yang dapat memengaruhi penggunaan narkoba. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap risiko penyalahgunaan narkoba telah dibuktikan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Ditemukan bahwa sampel yang memiliki pendidikan menengah atau lebih tinggi memiliki risiko lebih rendah menggunakan narkoba jika dibandingkan dengan sampel yang tidak memiliki pendidikan formal. Penjelasan yang memungkinkan dari temuan ini adalah sampel yang tidak bisa membaca atau buta huruf memiliki informasi yang kurang tentang dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kesehatan.⁹

Angka perceraian merupakan salah satu faktor keluarga yang menjadi determinan kejadian penyalahgunaan narkoba. Variabel perceraian orang tua terbukti memengaruhi status penyalahgunaan narkoba pada kelompok remaja. Perceraian adalah faktor risiko yang kuat untuk kejadian penyalahgunaan narkoba, bahkan setelah disesuaikan dengan perilaku menyimpang pada masa remaja dan riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga.¹⁰ Perceraian dapat menjadi sumber stres bagi anak dan orang tua yang mengalami perceraian tersebut. Dalam penelitian lainnya, tingkat stres terbukti berperan sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba.¹¹ Meski demikian, hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di SMA negeri berakreditasi A se-Kota Makassar, di mana ditemukan bahwa kondisi keluarga tidak berpotensi membuat responden menyalahgunakan narkoba.¹²

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor demografis yang menjadi determinan kejadian penyalahgunaan narkoba. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang memicu tindakan kriminal karena kecenderungan daerah padat penduduk untuk mengalami permasalahan ekonomi, kesejahteraan, kebutuhan pangan, serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung tindakan kriminal.¹³ Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah berakibat pada kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Terlibat dalam perdagangan ilegal narkoba merupakan salah satu tindakan kriminal yang bisa terjadi akibat kepadatan penduduk.

Pemakaian narkoba dapat dipengaruhi oleh terbukanya akses dan kemudahan mendapatkan narkoba. Terminal merupakan salah satu tempat keramaian yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba, maupun tempat untuk menggunakannya. Penduduk yang tinggal tinggal berdekatan dengan tempat ramai seperti pasar dan terminal dianggap memiliki akses yang lebih besar untuk bisa mendapatkan narkoba (Badan Narkotika Nasional (BNN), 2020).³ Kurangnya pengawasan daerah-daerah tersebut juga dapat mempengaruhi tingginya transaksi jual-beli narkoba.

Berdasarkan Peta Kota Makassar tahun 2022, kawasan pesisir tersebar di 9 kecamatan di Kota Makassar. Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo menjadi kecamatan dengan kelurahan pesisir terbanyak, yaitu sebanyak 5 kelurahan. Berdasarkan hasil pemetaan kawasan pesisir menggunakan metode analisis buffer terhadap garis pantai dan pemetaan kawasan rawan narkoba di Kota Makassar tahun 2022, ditemukan bahwa sebagian besar kelurahan berstatus waspada narkoba berada di dalam jangkauan garis pantai, baik pada zona 1000 m, 2000 m, maupun 3000 m. Sebanyak 48 dari 56 kelurahan waspada

(85.71%) termasuk pada jangkauan garis pantai. Sebanyak 8 kelurahan yang tidak termasuk ke dalam zona 3000 m dari garis pantai yaitu Kelurahan Bontoduri, Kelurahan Mannuruki, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kelurahan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa, dan Kelurahan Buntusu.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Wilayah Sumatra Utara, penyalahgunaan narkoba terbanyak ditemukan di wilayah pesisir pantai. Hal ini terjadi karena penyelundupan narkoba melalui pelabuhan Internasional yang ada di Sumatra Utara.¹⁴ Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Sumatera Utara, dikatakan bahwa daerah yang berbatasan dengan pantai merupakan salah satu daerah rawan penyalahgunaan narkoba. Salah satu contohnya adalah kawasan Gunung Sitoli yang terletak di kawasan pesisir merupakan kawasan yang perlu mendapatkan perhatian karena kawasan pesisir merupakan kawasan yang rawan masuknya narkoba.¹⁵

Keterkaitan kawasan kumuh dengan peredaran ilegal narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial dan ekonomi. Masyarakat permukiman kumuh umumnya memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi sehingga banyak pengangguran yang terlibat dalam bisnis narkoba karena banyaknya keuntungan yang didapatkan.¹⁶ Kawasan kumuh memiliki beberapa faktor risiko yang memengaruhi tingginya kejadian kecanduan narkoba, di antaranya mudahnya ketersediaan narkoba, paparan rokok tembakau, dan menjadi anak yang bekerja.¹⁷

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kawasan rawan narkoba dan variabel angka perceraian kasar (sig. 2-tailed 0,006) dan kepadatan penduduk (sig. 2-tailed 0,000). Terdapat kesesuaian antara distribusi kawasan rawan narkoba oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan distribusi pendidikan rendah (56,21%), angka perceraian kasar (54,24%), kepadatan penduduk (63,4%), dan kawasan kumuh (56,21%), di mana kelurahan berstatus siaga memiliki risiko yang lebih rendah sedangkan kelurahan berstatus waspada memiliki risiko yang lebih tinggi pada variabel tersebut. Terdapat 7 titik terminal di Kota Makassar dan masing masing menjangkau setidaknya 2 kelurahan berstatus waspada. Sebanyak 85,71% kelurahan berstatus waspada termasuk dalam jangkauan 3000 meter dari garis Pantai. Saran kepada BNNP Sulawesi Selatan adalah melakukan penguatan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada kelurahan-kelurahan yang memiliki persentase pendidikan rendah yang tinggi, banyak terjadi kasus perceraian, padat penduduk, terdapat kawasan kumuh, terletak di sekitar area terminal dan pesisir. Kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan data kelurahan pada variabel angka perceraian kasar di Kota Makassar.

REFERENSI

1. United Nations Office on Drug and Crime. Global overview: drug demand. In: World Drug Report 2. Global Overview: Drug Demand Drug Supply. 2022.
2. Fathurrohman, Rizal A, Aditya R, Isnaini M, Isnaini F. Bunga rampai - War On Drugs: Menuju

- Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR) [Internet]. 2022. Available from: www.bnn.go.id
3. Badan Narkotika Nasional. Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba 2019. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia [Internet]. 2020. Available from: <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/7.Survei-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Kuantitatif-2019.pdf>
4. Humas BNN. Press release akhir tahun BNNP Sulawesi Selatan [Internet]. BNNP Sulsel; 2020. Available from: <https://sulsel.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-bnnp-sulawesi-selatan/>
5. Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Survey prevalensi 2018 [Internet]. 2019. Available from: www.bnn.go.id
6. Supriadi IO, Rahmadi E, Dewi C. Penentuan daerah rawan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung menggunakan sistem informasi geografis (SIG). 2022;1:1–6.
7. Putri SS, Budyanra. Determinan status penyalahgunaan narkoba pada remaja usia 15-24 tahun di Indonesia tahun 2017. Seminar Nasional Official Statistics. 2020;1:571–81. Available from: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.421>
8. Bolstad P. GIS fundamentals: a first text on geographic information system. 5th ed. In: Manual of Geospatial Science and Technology. 2nd ed. 2016.
9. Zebaba D, Yassin A, Abdulkadir A, Mama M. Geographical variation and correlates of substance use among married men in Ethiopia: spatial and multilevel analysis from Ethiopian Demographic and Health Survey 2016. *BMJ Open*. 2022;12(9):1–11. Available from: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062060>
10. Edwards AC, Larsson Lönn S, Sundquist J, Kendler KS, Sundquist K. Associations between divorce and onset of drug abuse in a Swedish national sample. *Am J Epidemiol*. 2018;187(5):1010–8. Available from: <https://doi.org/10.1093/aje/kwx321>
11. Kurniadi YU, et al. Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nusantara: *J Ilmu Pengetahuan Sosial*. 2020;7(2):408–20.
12. Hikmat MM, Thaha ILM, Dwinata I. Faktor yang memungkinkan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN akreditasi A se-Kota Makassar. *Hasanuddin Journal of Public Health*. 2020;1(1):1–8. Available from: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hjph>
13. Edwart AO, Azhar Z. Pengaruh tingkat pendidikan, kepadatan penduduk dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia. *J Kajian Ekonomi Pembangunan*. 2019;1(3):759–68. Available from: <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7703>
14. Widjiyati N, Utami E, Pramono E. Sistem informasi geografis penyebaran pasien narkoba. *J Teknologi Informasi*. 2019;14(2):88–95. Available from: <https://doi.org/10.35842/jtir.v14i2.292>
15. Isnaini F, Pramudhiarta N. Geographic information system (GIS) for mapping of drug abuse using spatial correlation analysis in North Sumatra Province. *Jurnal Pertahanan*. 2020;6:416–28. Available from: <http://jurnal.idu.ac.id/files/journals/16/articles/145/attachment/145-367-1-AT.pdf>
16. Randa RB. Strategi komunikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyosialisasikan dampak narkoba terhadap pelajar di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2019;8:75–88.
17. Faiza B, Mehmood H, Naz S, Naz S. Prevalence and determinants of substance abuse among slum dwellers in Islamabad-Pakistan. *IJTM RPH*. 2019;3(2):107–13. Available from: <https://doi.org/10.21106/ijtmrph.85>